



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)

Accredited No. 204/E/KPT/2022

DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27404>

Volume 10, No. 4, 2025 (2756-2764)

---

# ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DESA (SAPDES) DALAM PENGENDALIAN INTERNAL KEUANGAN DI DESA SUKADAMAI

**Pitri Pergiwa<sup>1</sup>, Sulaeman<sup>2</sup>, Idang Nurodin<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah sukabumi

[pitripergiwa2003@gmail.com](mailto:pitripergiwa2003@gmail.com), [sulaeman1342@ummi.ac.id](mailto:sulaeman1342@ummi.ac.id),

[Idangnurodin4@gmail.com](mailto:Idangnurodin4@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Desa Sukadamai dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) namun masih menghadapi berbagai kendala dalam penguatan sistem pengendalian internal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) dalam struktur dan proses pengendalian internal keuangan desa, mengevaluasi efektivitas komponen pengendalian internal berdasarkan kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) di Desa Sukadamai telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kelemahan dalam pemisahan tugas, sistem evaluasi internal, serta kurangnya pelatihan aparatur desa. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman akuntansi yang rendah, serta ketergantungan pada satu pihak dalam pencatatan keuangan. Meskipun demikian, penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) dinilai telah mendukung upaya peningkatan pengendalian internal dan menjadi pijakan penting menuju tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes), Pengendalian Internal Keuangan.

### Abstract

This study is motivated by the crucial role of implementing the Village Government Accounting Standards (SAPDes) to enhance transparency and accountability in village financial management. Sukadamai Village was chosen as the research site due to its adoption of Village Government Accounting Standards (SAPDes), while still facing challenges in strengthening its internal control system. The aim of this research is to analyze the implementation of Village Government Accounting Standards (SAPDes) within the structure and process of internal financial control, assess the effectiveness of internal control components based on the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) framework, and identify the obstacles and challenges faced in the process. This study employed a qualitative approach with a case study method, and data were collected through interviews, observations, and document analysis. The results reveal that while the implementation of Village Government Accounting Standards (SAPDes) in Sukadamai Village has been fairly effective, it remains suboptimal. Weaknesses persist in task separation, internal evaluation mechanisms, and the lack of training for village officials. The main constraints include limited human resources, insufficient accounting knowledge, and reliance on a single person for financial recording. Nevertheless, the application of Village Government Accounting Standards (SAPDes) is considered to have contributed positively to strengthening internal control and serves as a critical foundation toward achieving better financial governance at the village level.

**Keyword:** Village Government Accounting Standards (SAPDes), Internal Control Finance.

## 1. Pendahuluan

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat lokal. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) menjadi instrumen penting untuk menjamin

penyusunan laporan keuangan desa yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai prinsip akuntansi berbasis akrual. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk mendorong penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes), termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian, implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) di berbagai desa masih menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya pelatihan teknis, serta lemahnya sistem pengendalian internal.

Desa Sukadamai di Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu desa yang telah mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) dalam pengelolaan keuangannya. Namun, efektivitas penerapannya dalam memperkuat pengendalian internal masih menjadi persoalan, terutama terkait dengan pemisahan tugas, dokumentasi, serta evaluasi laporan keuangan. Informasi keuangan memang disampaikan ke masyarakat secara terbuka melalui media visual seperti banner, tetapi belum sepenuhnya mengacu pada struktur laporan standar yang ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen formal dalam menerapkan standar akuntansi dan praktik pengelolaan keuangan desa secara substansial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) dalam struktur dan proses pengendalian internal keuangan di Desa Sukadamai, mengevaluasi efektivitas penerapan lima komponen pengendalian internal berdasarkan kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) (*Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information & Communication, Monitoring*), serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi tersebut. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik akuntansi pemerintahan di tingkat desa serta bagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) diintegrasikan dalam upaya pengendalian keuangan secara sistematis. Secara konseptual dan praktis, penelitian ini memberikan kontribusi penting. Dari sisi akademis, studi ini memperkaya literatur mengenai implementasi standar akuntansi di sektor pemerintahan desa serta integrasinya dengan sistem pengendalian internal berbasis *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan desa, khususnya dalam hal pelaporan dan pengawasan internal. Selain itu, temuan penelitian juga relevan bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merancang

pelatihan teknis atau intervensi kebijakan yang mendukung penguatan sistem keuangan desa secara berkelanjutan.

## 2. Kajian Pustaka

### 1. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes)

Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) merupakan sistem akuntansi berbasis akrual yang diterapkan di tingkat desa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. SAPDes disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) melalui proses *due process* yang memastikan standar ini relevan dan profesional (KSAP, 2024). Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) mencakup komponen laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Ramli, 2020). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) diharapkan mendukung tata kelola desa berbasis prinsip *good governance*, melalui pelaporan yang tertib administrasi serta penguatan sistem pengendalian internal (Herawati, 2020).

### 2. Pengendalian Internal (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) Framework)

Pengendalian internal dalam konteks pemerintahan desa bertujuan untuk menjamin efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan. *Framework Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) menjadi acuan dalam evaluasi sistem pengendalian internal yang mencakup lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Suárez, 2017). Implementasi yang baik dari komponen tersebut dapat meminimalisir risiko kecurangan (*fraud*) dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran (Ismatullah & Eriswanto, 2016; Lestari, 2023).

### 3. Peran Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi

Efektivitas implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi serta kemampuan mengelola sistem informasi keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa (Adam et al., 2023; Yogi Pranata, 2024). Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Putri dan Maryono, 2022; Pratmanto et al., 2024).

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) dalam pengendalian internal keuangan di Desa Sukadamai. Lokasi ini dipilih secara *purposive* karena telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) dalam pengelolaan keuangannya. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Ketua RT, serta observasi langsung terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan keuangan desa, serta media transparansi publik.

Model penelitian ini merujuk pada lima komponen pengendalian internal berdasarkan kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Variabel dalam penelitian ini tidak diukur secara kuantitatif, melainkan didefinisikan secara operasional berdasarkan peran dan fungsi masing-masing komponen dalam mendukung pengendalian keuangan desa. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif berdasarkan model Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan melakukan konfirmasi ulang (*member check*) terhadap hasil temuan kepada para informan.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) di Desa Sukadamai telah dilaksanakan secara bertahap, namun masih terdapat sejumlah kendala dalam penerapannya sebagai bagian dari sistem pengendalian internal keuangan desa. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan informan kunci, ditemukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) mengacu pada lima komponen utama pengendalian internal sesuai kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO).

#### 1. Lingkungan Pengendalian (*Control Enviroment*)

Desa Sukadamai telah memiliki struktur organisasi yang cukup jelas dan terdistribusi, di mana tugas-tugas bendahara, kepala urusan, dan perangkat lainnya telah dibagi sesuai tanggung jawab. Namun, kelemahan utama terletak pada belum adanya dokumen formal seperti Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang tertulis, serta terbatasnya pelatihan atau peningkatan kapasitas aparat desa dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Perangkat desa belum memiliki mekanisme yang sistematis untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam pengelolaan keuangan. Proses penganggaran dan pelaporan masih dilakukan secara administratif tanpa adanya analisis risiko keuangan yang mendalam. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis dan belum adanya instrumen evaluasi risiko secara formal di tingkat desa.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activies*)

Desa Sukadamai telah dilaksanakan melalui pencatatan transaksi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban, namun belum sepenuhnya konsisten dan rapi. Beberapa dokumen sumber seperti bukti transaksi, kuitansi, dan nota pembelian belum dikelola dengan sistematis. Proses pengarsipan masih bersifat manual dan kurang terdokumentasi secara lengkap, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan atau kehilangan informasi penting.

4. Aspek Informasi dan Komunikasi (*Information and Comunication*)

Penyampaian informasi kepada masyarakat sudah dilakukan secara terbuka, seperti melalui banner realisasi anggaran. Meski demikian, struktur laporan yang disusun belum mengacu sepenuhnya pada format laporan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) yang ideal, seperti laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi yang disampaikan cenderung bersifat ringkas dan belum mencerminkan seluruh aspek kinerja keuangan desa.

5. Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat secara informal. Namun, proses monitoring ini lebih bersifat administratif dan belum ditindaklanjuti dengan evaluasi substantif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem audit internal juga belum tersedia, dan *feedback* terhadap temuan keuangan belum dikembangkan secara rutin.

Selain lima aspek utama tersebut, ditemukan pula beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan, dan kurangnya pendampingan dari pihak eksternal seperti inspektorat atau pendamping desa. Meskipun demikian, terdapat komitmen dari aparat desa untuk terus memperbaiki sistem keuangan desa melalui pelatihan dan digitalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sukadamai telah mengupayakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) dalam pengelolaan



keuangan, namun belum secara menyeluruh memenuhi standar akuntansi berbasis akrual. Hal ini sejalan dengan temuan Yani et al. (2018), yang menyatakan bahwa pemahaman sumber daya manusia (SDM) desa terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) menjadi kendala utama dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan. Secara keseluruhan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) di Desa Sukadamai sudah cukup baik namun belum maksimal dalam memperkuat pengendalian internal. Perlu penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dokumentasi sistem, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian keuangan desa.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) dalam pengendalian internal keuangan di Desa Sukadamai, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara sistematis dan mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipatif. Pemerintah desa menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan sistem keuangan yang tertib, meskipun pemahaman teknis masyarakat terhadap Badan Permasyarakatan Desa (BPD) masih terbatas. Pengendalian internal keuangan berdasarkan kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) juga telah diterapkan dengan baik, meliputi komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Meskipun belum seluruhnya terdokumentasi secara formal, pelaksanaan pengendalian telah menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi, dengan dukungan dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan pengawasan eksternal. Adapun hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian internal adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kendala teknologi, seperti gangguan sistem pelaporan dan koneksi internet yang tidak stabil. Namun demikian, tingginya komitmen dari pimpinan desa serta keterbukaan informasi telah menjadi faktor pendukung utama dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel.

### **Saran**

1. Penguatan Pemahaman dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) Pemerintah Desa Sukadamai perlu meningkatkan pemahaman

aparatur desa terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes) melalui pelatihan teknis, pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan penyediaan pedoman tertulis. Hal ini penting untuk memastikan proses pencatatan dan pelaporan keuangan berjalan sistematis dan sesuai standar akuntansi.

2. Optimalisasi Pengendalian Internal, pengendalian internal perlu diperkuat dengan penerapan kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), termasuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pemisahan fungsi kerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas juga perlu dioptimalkan agar pengendalian keuangan lebih objektif dan terdokumentasi.
3. Penanganan Hambatan sumber daya manusia (SDM), Teknologi, dan Komitmen Pimpinan Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan komitmen pimpinan, desa disarankan mengadakan pelatihan berbasis kompetensi, mengoptimalkan aplikasi SIMPEL DESA, serta meneguhkan komitmen pimpinan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

## 6. Daftar Pustaka

Adam, et al. (2023). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Informasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa*.

Apriyanto, R. (2021). *Pengaruh Penerapan SAPDes terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa*.

Herawati, N. (2020). *Good Village Governance: Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa*.

Ismatullah & Eriswanto. (2016). *Pengendalian Internal sebagai Alat Pengawasan Keuangan Pemerintah Desa*.

KSAP. (2024). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa: Laporan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Lestari, R. (2023). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Desa*.

Pratmanto, A., et al. (2024). *Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Cloud*.

Putri, A. & Maryono, A. (2022). *Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa*.



Putri, A. (2024). *Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Desa*.

Ramli. (2020). *Akuntansi Pemerintahan: Panduan PSAP dan Laporan Keuangan Desa*.

Suárez, M. (2017). *Implementasi Kerangka COSO dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*.

Yani, et al. (2018). *Analisis Penerapan SAPDes pada Kantor Desa Cempaka Sakti*.

Yogi Pranata. (2024). *Modernisasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa di Era Digital*.